DAFTAR RUJUKAN

BUKU

Ali, Z. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artadi, I K. 2017. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya.* Denpasar: Pustaka Bali Post.

Azwar, S. 2016. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Hadikusuma, H. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* Bandung: Mandar Maju.

Hadikusuma, H. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut "Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama"*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Isnaeni, M. 2016. *Hukum Perkawinan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama.

Kamus Besar Indonesia (KBBI).

Mas, G. R. 2003. *Perkawinan Yang Ideal*. Surabaya: Paramita (Cetakan Pertama).

Mas, G. R. 2017. *Perkawinan Yang Ideal*. Surabaya: Paramita.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Rato, D. 2015. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Sembiring, D. R. 2017. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Soehardi, V. D. tanpa tahun. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Vorkink-Van Hoeve.

Soekanto, S. 1958. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Soeroengan.

Soepomo. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.

Subekti, P. R. 2006. *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Bandung: PT Alumni.

Sudarsono, S. 2008. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sudiatmaka, K. N. 2015. *Hukum Waris Masyarakat Indoensia*. Singaraja: Undikhsa Pres.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suparman, E. 2018. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.

Suparman, M. 2017. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Utomo, L. 2017. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wignojodipoero, S. 2018. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.

Zainudin, A. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL/ARTIKEL

Adnyani, N. K. S. 2016. "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Diitinjau Dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Volume 5, Nomor 1 (hlm.754-769).

Adnyani, N. K. S. 2017. "Sistem Perkawinan Nyentana Dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 6, Nomor 2 (hlm.675-686).

Adnyani, N. K. S. dkk. 2016. "Putusan Desa Adat sebagai Legitimasi Masyarakat Adat Terhadap Perkawinan Nyentana di Kabupaten Tabanan". *Seminar Nasional Riset Inovatif (SENARI)*. (hlm.676). Hutahaean, B. 2013. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak". Volume 6, Nomor 1 (hlm.64-79).

Subiharta. 2015. "Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3, (hlm.385398)

Suastika, I. N. 2017. "Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Di Bali (Studi Kasus Di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Volume 5, Nomor 2 (hlm.828-834).

Suastika, I. N. 2010. "Nyentana Arus Balik Ideologi Patrilinial (Studi Kasus Status, Kedudukan, dan Peranan Perempuan *Putrika* Setelah Perceraian Pada Masyarakat Bali Aga di Kabupaten Bangli)". *Jurnal Ikatan Keluarga Alumni (IKA)*. Volume 8, Nomor 2 (hlm.139-150).

Udytama, I. W. 2015. "Status Laki-Laki dan Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana". *Jurnal Advokasi*. Volume 5, Nomor 1 (hlm.73-88).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2003 *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606).*

SKRIPSI

Puspa, K. P.S. 2018. *Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Adat Bali*. Fakultas Hukum. Hukum Keperdataan. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

TESIS

Rudin, Denny. 2009. *Kedudukan Anak Angkat menurut Hukum Waris Adat Bali di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan-Bali*. (Tesisi Program Studi Magister Universitas Diponegoro).

Rawista, Sukirno. 2012. *Kedudukan Istri Sebagai Sentana Rajeg dan Suami Sebagai Predana Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Nyeburin*. (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro).

INTERNET

Yasin, M. 2020. "Kedudukan Hukum Perkawinan Nyentana di Bali". Tersedia pada https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt536e24137294b/kedudukan-hukum-perkawinan-nyentana-di-bali/ (diakses 01 November 2020) (pukul 19.45).

Hakim, A. 2012. "Hak Waris Janda dan Anak Menurut Hukum Hindu".Tersedia pada https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f086b0189333/hakwaris-janda-dan-anak-menurut-hukumhindu/#:~:text=Dalam%20Hukum%20Waris%20Hindu%20yang,agama%20Hindu%20tidak%20berhak%20mewaris (diakses 17 Desember 2020) (pukul 08.00).